



WALIKOTA PAREPARE

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 11 TAHUN 2014

TENTANG

**PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 (I) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang. Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah Tahun Anggaran berakhir;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

10. Undang-Undang.....

10. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5239);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
12. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
23. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Parepare (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2005 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 48) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 9 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2007 Nomor 9, tambahan Lembaran Daerah Kota Parepare Nomor 54);
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 1 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kota Parepare Tahun 2013 Nomor 1);

Dengan.....

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA PAREPARE

dan
WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2013.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsure penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Bagian Keuangan Secretariat Daerah Kota Parepare.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare dalam Tahun Anggaran 2013.

BAB II
PERATANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

- 1) Peratanggungjawaban Pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- 2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik Daerah.

Pasal 3.....

Pasal 3

Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Tahun Anggaran 2013 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp. 614.513.936.577,64
b. Belanja	<u>Rp. 565.544.391.749,81</u>
Surplus/deficit	Rp. 48.969.544.827,53
c. Pembiayaan	
1. Penerimaan	Rp. 2.245.918.263,73
2. Pengeluaran	<u>Rp. 29.077.304.281,25</u>
Surplus/deficit	Rp.(26.831.386.017,52)

Pasal 4

Uraian Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, sebagai berikut :

1. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pendapatan sejumlah Rp (34.482.049.958,93) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran pendapatan setelah Perubahan Rp. 648.995.986.536,27
 - b. Realisasi Rp. 614.513.936.577,34
Selisih lebih/(kurang) Rp. (34.482.049.958,93)
2. Selisih Anggaran dengan Realisasi Belanja sejumlah Rp(48.836.930.122,19) dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 614.381.321.872,00
 - b. Realisasi Rp. 565.544.391.749,81
Selisih lebih/(kurang) Rp. 48.836.930.122,19
3. Selisih Anggaran dengan Realisasi surplus/deficit sejumlah Rp. (83.318.980.018,12) dengan rincian:
 - a. Surplus/deficit perubahan Rp. 34.614.664.664,27
 - b. Realisasi Rp. 48.969.544.827,53
selisih lebi/(kurang) Rp. (83.318.980.081,12)
4. Selisih Anggaran dengan Realisasi Penerimaan Pembiayaan sejumlah Rp. (216.675.314,00) dengan rincian sebagaiberikut :
 - a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan Rp. 2.462.593.577,73
 - b. Realisasi Rp. 2.245.918.263,73
Selisih lebih/(kurang) Rp. (216.675.314,00)
5. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sejumlah Rp. (7.999.953.960,75) dengan rincian sebagaiberikut :
 - a. Anggaran Pengeluaran Perubahan Rp. 37.077.258.242,00
 - b. Realisasi Rp. 29.077.304.218,25
Selisih lebih/(kurang) Rp. 7.999.953.960,75

6.Selisih.....

6. Selisih Anggaran dengan Realisasi Pembiayaan sejumlah Rp.(7.783.278.646,75) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Anggaran Pembiayaan neto setelah Perubahan | Rp. (34.614.664.664,27) |
| b. Realisasi | Rp. (26.831.386.017,52) |
| selisih lebih/(kurang) | Rp. (7.783.278.646,75) |

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b per 31 Desember Tahun 2011 sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Jumlah Aset | Rp. 1.858.580.894.384,75 |
| b. Jumlah Kewajiban | Rp. 55.639.935.184,49 |
| c. Jumlah Ekuitas Dana | Rp. 1.802.940.959.200,26 |

Pasal 6

Laporan arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2013 sebagai berikut :

- | | |
|--|---------------------------|
| a. Saldo Kas Awal per 1 Januari Tahun 2013 | Rp. 1.351.217.047,01 ; |
| b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi | Rp. 142.806.035.151,44 ; |
| c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non Keuangan | Rp. (94.107.679.381,00) ; |
| d. Arus kas dari aktivitas pembiayaan | Rp. (28.820.255.861,25) ; |
| e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran | Rp. (100.882.242,00) |
| f. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2013 | Rp. 22.043.625.841,01; |

Pasal 7

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d Tahun Anggaran memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 8

- a. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :
- Lampiran I : Ringkasan laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintah daerah dan Organisasi.
- Lampiran I.2 : Rincian Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan Dan Belanja Pembiayaan.
- Lampiran I.3 : Rekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelola keuangan Negara.
- Lampiran I.4 : Daftar Piutang Daerah

Lampiran I.5.....

Lampiran I.5 : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah.

Lampiran I.6 : Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan aset tetap daerah.

Lampiran I.7 : Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya.

Lampiran I.8 : Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir Tahun dan dianggarkan kembali dalam Tahun berikutnya.

Lampiran I.9 : Daftar dana cadangan daerah, dan

Lampiran I.10: Daftar pinjaman daerah dan obligasi Daerah.

b. Lampiran II : Neraca

c. Lampiran III : Laporan Arus kas.

d. Lampiran IV : Catatan atas laporan keuangan.

Pasal 9

Lampiran laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terdiri dari :

a. Laporan kinerja tercantum dalam lampiran V Peraturan Daerah ini.

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Walikota Parepare menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai rincian lebih lanjut dari Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 18 Agustus 2014

WAKIL WALIKOTA,



TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 18 Agustus 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,



MUSTAFA MAPPANGARA

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2014 NOMOR 12

NO REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR (17.11/2014)